



Sistem Pertahanan Semesta dan Maritim di Indonesia: Studi Kasus pada Pelatihan KOMCAD dan Laut Natuna Utara

Lilo Sanjaya*, Saiful Amri, Ananda Ryo Bastian Harefa, Ratu Aisyah Diva Maha, Jerry Indrawan

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Dengan terbentuknya sebnegara kepulauan, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam pertahanan, baik di darat maupun di laut. Kondisi geografis ini mengharuskan sistem pertahanan yang kompleks dan terintegrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa pelaksanaan Sistem Pertahanan Semesta melalui pelatihan Komponen Cadangan (Komcad), serta peran dan tantangan pertahanan maritim Indonesia, khususnya berkaitan dengan dinamika keamanan di Laut Natuna Utara. Peraturan perundang-undangan pertahanan, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan laporan media dan lembaga terkait adalah sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode analisis dokumen. Data dianalisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan pertahanan nasional melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa pelatihan Komponen Cadangan adalah langkah strategis untuk meningkatkan pertahanan darat dengan melibatkan warga negara. Namun demikian, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kualitas pelatihan yang belum optimal, dan kurangnya fasilitas pendukung. Sebaliknya, tindakan kapal asing dan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meningkatkan tantangan pertahanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan patroli harus ditingkatkan, alat utama sistem persenjataan harus dimodernisasi, dan lembaga terkait perlu melakukan kolaborasi lebih lanjut.

Kata kunci: Pertahanan Alam Semesta, Pertahanan Maritim, Komponen Cadangan, Laut Natuna Utara, Kedaulatan Negara, Keamanan Maritim.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3513>

*Correspondence: Lilo Sanjaya

Email: lilosanjaya7@gmail.com

Received: 06-04-2026

Accepted: 06-05-2026

Published: 06-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesia, an archipelago nation, must contend with a number of defence issues on land and at sea. A sophisticated and integrated national defence system is necessary given these geographic circumstances. In addition to analysing the function and difficulties of Indonesia's maritime defence, especially with regard to security dynamics in the North Natuna Sea, this study will look at the implementation of the Total Defence System through Reserve Component (Komponen Cadangan/Komcad) training. Document analysis is the main technique used in this descriptive qualitative study. Laws and regulations pertaining to defence, official government documents, scholarly publications, and reports from pertinent organisations and media outlets make up the data sources. Through phases of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, the data were examined to gain a thorough grasp of the execution of national defence policy. The results show that Reserve Component training is a calculated attempt to increase land defence through citizen participation in national defence initiatives. However, there are still a number of obstacles to its implementation, such as limited funding, poor training quality, and a lack of supporting facilities. In the meantime, the presence of foreign vessels and violations within Indonesia's Exclusive Economic Zone present growing challenges for Indonesia's maritime defence in the North Natuna Sea. This circumstance emphasises the necessity of improving patrol capabilities, updating defence gear, and bolstering cooperation and coordination between pertinent institutions.

Keywords: Total Defense System, Maritime Defense, Reserve Component, North Natuna Sea, State Sovereignty, Maritime Security

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia menghadapi berbagai macam potensi ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional (Suseto et al., 2025). Ancaman tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk agresi militer, tetapi juga pelanggaran wilayah, kejahatan lintas negara, persaingan geopolitik, hingga konflik sumber daya di laut (Lemhannas RI, 2021). Dalam konteks ini, Indonesia mengembangkan dua pilar utama pertahanan, yaitu Sistem Pertahanan Semesta (darat) dan Sistem Pertahanan Maritim (laut). Kedua sistem tersebut bukan berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi untuk menciptakan pertahanan negara yang menyeluruh, adaptif, dan sesuai karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Keduanya menjadi sangat penting ketika Indonesia dihadapkan pada dinamika keamanan nasional, seperti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari pertahanan darat, serta konflik perbatasan dan kehadiran kapal asing di Laut Natuna Utara yang menguji kekuatan pertahanan maritim (Marliani, 2025).

Konsep pertahanan semesta berlandaskan pada ketentuan konstitusional yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip ini menunjukkan bahwa pertahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal seperti TNI dan Polri, melainkan merupakan usaha kolektif seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan semesta mengandalkan mobilisasi seluruh komponen bangsa utama, cadangan, maupun pendukung dengan tujuan menciptakan kekuatan pertahanan yang besar dan tersebar (Indrawan, 2018). Dalam praktiknya, pelatihan Komcad menjadi instrumen penting untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat (Kemenko Polkam RI, 2025). Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas pertahanan darat, membentuk kedisiplinan warga negara, serta memastikan terdapat sumber daya manusia yang dapat digerakkan ketika dibutuhkan. Meski demikian, berbagai kendala seperti efektivitas pelatihan, keterbatasan anggaran, serta minimnya fasilitas pendukung menjadikan implementasi Komcad belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, pertahanan maritim memiliki posisi strategis bagi Indonesia mengingat statusnya sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang telah diakui dalam UNCLOS 1982 (Gultom et al., 2025). Sistem pertahanan maritim tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi integritas wilayah laut, mengamankan jalur pelayaran internasional, serta mengelola kekayaan sumber daya maritim secara berdaulat (Asmara, 2025). Di kawasan Laut Natuna Utara, urgensi pertahanan maritim semakin terasa karena wilayah tersebut kerap menjadi arena gesekan geopolitik akibat masuknya kapal asing yang memanfaatkan klaim sepihak negara lain (Antara News, 2024). Keberadaan kapal penjaga pantai asing dan kapal ikan ilegal menjadi tantangan nyata yang menguji kapasitas patroli, diplomasi, serta koordinasi keamanan Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025).

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa kedua sistem pertahanan Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Pada pertahanan semesta, persoalan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan politik dan anggaran yang belum stabil (Susanto et al., 2025). Sementara itu, pada pertahanan maritim, Indonesia masih harus memperkuat kemampuan memperluas kerja sama internasional,

serta memperkuat diplomasi maritim agar mampu menghadapi tekanan geopolitik di perairan strategis (Kemenko Polkam RI, 2025). Melihat kompleksitas ancaman yang berkembang, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi sistem pertahanan semesta dan maritim melalui studi kasus pelatihan Komcad serta dinamika keamanan di Laut Natuna Utara. Kajian ini diperlukan untuk memahami sejauh mana kedua sistem tersebut berjalan, apa saja kekuatan dan kelemahannya, serta peluang pengembangannya di masa depan. Dengan evaluasi yang komprehensif, Indonesia dapat merumuskan strategi pertahanan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan keutuhan wilayah nasional di tengah kondisi geopolitik yang semakin dinamis (Hikam & Praditya, 2025).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dianggap sesuai untuk mengkaji fenomena kebijakan pertahanan nasional dan dinamika keamanan maritim karena kedua isu tersebut membutuhkan pemahaman kontekstual yang mendalam. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis realitas sosial secara holistik melalui interpretasi mendalam terhadap teks dan konteks sosial. Pendapat tersebut diperkuat oleh Creswell (2014) yang menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan untuk memahami proses kebijakan yang bersifat kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi angka.

Metode utama yang digunakan adalah analisis dokumen (*document analysis*), karena data penelitian berasal dari regulasi, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta laporan media yang dapat diakses publik. Bowen (2009) menegaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode yang valid dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti menelaah kebijakan dan praktik institusional; ia menambahkan bahwa dokumen memberikan "*evidence-based insights*" yang penting untuk memahami dinamika kebijakan (Bowen, 2009). Untuk menafsirkan dokumen secara sistematis, penelitian ini juga menggunakan kerangka content analysis sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2019), yang menyebutkan bahwa analisis isi memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kategori tematik, dan makna yang tersembunyi dalam teks kebijakan.

Sumber data yang dianalisis terdiri dari dokumen hukum terkait pertahanan nasional, termasuk Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pelatihan penyegaran Komcad. Kedua dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami kerangka hukum dan implementasi Komcad. Selain itu, publikasi ilmiah open-access mengenai metodologi kualitatif dan studi maritim turut dianalisis untuk memperoleh perspektif akademik yang memadai. Data tambahan berupa laporan media dan rilis lembaga resmi, seperti laporan Bakamla tentang aktivitas kapal asing di Laut Natuna Utara, digunakan untuk memahami dinamika faktual di lapangan.

Proses analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiganya disebut sebagai langkah fundamental untuk menghasilkan interpretasi yang

dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap reduksi, dokumen diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, seperti efektivitas pelaksanaan Komcad, tantangan dalam pertahanan semesta, serta dinamika ancaman maritim. Pada tahap penyajian data, informasi dikategorikan ke dalam tema-tema seperti aspek hukum, pelaksanaan kebijakan, dan konteks geopolitik. Di tahap akhir, kesimpulan ditarik dengan menghubungkan pola temuan yang muncul secara konsisten dalam berbagai sumber, sesuai prinsip analisis kualitatif yang diuraikan oleh Miles et al. (2014).

Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari regulasi, laporan lembaga pemerintah, publikasi akademik, dan laporan media terbuka. Selain itu, teknik ini juga mendukung keterlacakan interpretasi, karena setiap argumen dapat dikonfirmasi melalui lebih dari satu bukti tertulis.

Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan analisis komprehensif mengenai implementasi Sistem Pertahanan Semesta dan sistem pertahanan maritim Indonesia dalam konteks keamanan kontemporer. Metodologi ini memastikan bahwa setiap kesimpulan didasarkan pada bukti tertulis yang dapat diverifikasi, sehingga hasil studi dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif akademis maupun kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan Prioritas Pertahanan Darat

Landasan Filosofis, Hukum, dan Komponen Struktural Sishankamrata

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) bukanlah sekadar mekanisme operasional, melainkan sebuah filosofi pertahanan nasional yang tertanam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa mempertahankan negara kepulauan yang memiliki keunikan geografis dan pluralitas sosial hanya dapat dilakukan melalui mobilisasi total seluruh potensi nasional. Sishankamrata secara hukum diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan tiga ciri fundamentalnya: kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Karakteristik kesemestaan menjamin bahwa daya tangkal negara melampaui kemampuan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI semata, mencakup kesiapan psikologis, ideologis, dan material dari seluruh rakyat.

Secara struktural, kekuatan pertahanan terbagi menjadi tiga pilar fungsional yang harus beroperasi secara sinergis. Komponen Utama (KU) diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berfungsi sebagai kekuatan inti profesional dan permanen yang bertugas melaksanakan pertahanan militer konvensional. Kedua, Komponen Cadangan (Komcad), yang terdiri dari warga negara yang telah melalui pelatihan militer dan diorganisir secara terstruktur untuk dimobilisasi guna memperbesar kapasitas operasional TNI dalam menghadapi ancaman militer yang memerlukan penambahan daya tempur. Terakhir, Komponen Pendukung (KP), yang memiliki spektrum terluas, mencakup semua sumber daya nasional non-militer mulai dari kementerian/lembaga sipil, sarana prasarana vital, industri strategis, hingga seluruh elemen masyarakat sipil yang bertugas menyediakan dukungan logistik, informasi, dan bantuan administratif krusial bagi operasi Komponen Utama dan Cadangan (Suryohadiprojo, 2017). Kompleksitas interaksi dan

ketergantungan antar pilar inilah yang menjadi tantangan manajerial utama sistem pertahanan Indonesia.

Fenomena Orientasi Strategis: Realitas Prioritas Darat di Negara Kepulauan

Meskipun secara definisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang menempatkan dimensi maritim sebagai urat nadi kedaulatan, implementasi praktis Sishankamrata menunjukkan kecenderungan historis dan struktural yang memprioritaskan dimensi pertahanan darat. Fenomena ini bukan tanpa alasan; secara historis, ancaman internal pasca-kemerdekaan (seperti pemberontakan dan gerakan separatisme) selalu termanifestasi dalam konflik di daratan, menuntut postur militer yang mampu menjangkau dan mengamankan seluruh teritori darat.

Secara struktural, TNI Angkatan Darat (TNI AD) berfungsi sebagai poros utama dalam menjalankan aspek kewilayahan dan kerakyatan. Dengan jaringan Komando Kewilayahan (Kowil) yang tersebar hingga tingkat desa (Koramil), TNI AD menjadi instrumen tak tergantikan dalam Pembinaan Teritorial (Binter). Binter adalah mekanisme strategis untuk mengorganisir, melatih, dan menanamkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat sipil. Melalui jaringan Kowil yang masif ini, Sishankamrata menjamin bahwa pertahanan negara bersifat desentralistik, di mana setiap unit teritori daratan harus memiliki daya tahan dan kemampuan untuk melawan secara mandiri, menjadikannya garis pertahanan berlapis yang berlapis (Yudha & Wirayuda, 2021).

Analisis Komponen Cadangan Matra Darat sebagai Bukti Orientasi Strategis (Periode 2025)

Bukti nyata mengenai preferensi strategis terhadap pertahanan darat semakin dipertegas oleh implementasi program Komponen Cadangan (Komcad) yang diaktifkan secara agresif pasca-penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Data rekrutmen dan pelatihan Komcad yang berlangsung hingga periode 2025 menunjukkan adanya fokus sumber daya dan pelatihan yang dominan pada pembentukan Komcad Matra Darat.

Pelatihan Komcad Matra Darat dilakukan oleh Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di bawah naungan TNI AD. Kurikulumnya secara inheren menitikberatkan pada keterampilan tempur infanteri, penguasaan medan darat, dan integrasi dengan satuan teritorial. Secara strategis, Komcad Matra Darat diproyeksikan untuk secara cepat menambah kekuatan personel TNI AD di daerah operasi yang membutuhkan *mass mobilization*, seperti pengamanan perbatasan darat (misalnya di Kalimantan atau Papua) atau perlindungan pusat-pusat populasi dan pemerintahan. Prioritas ini mencerminkan asumsi strategis bahwa dalam skenario konflik berskala besar, kebutuhan personel yang paling mendesak dan paling mudah direkrut adalah untuk mengisi peran tempur darat (Siregar & Prabowo, 2023).

Sebaliknya, pembentukan Komcad Matra Laut dan Udara, meskipun juga diupayakan, menghadapi tantangan logistik dan teknis yang jauh lebih besar. Keterampilan yang dibutuhkan sangat spesialis (misalnya, operator sonar, teknisi radar, atau kru kapal),

memerlukan investasi teknologi yang tinggi, dan memiliki *output* personel yang lebih terbatas. Ketidakseimbangan ini menyoroti bahwa Sishankamrata, dalam praktiknya, belum sepenuhnya menginternalisasi kepentingan maritim yang seharusnya menjadi prioritas utama negara kepulauan.

Analisis Kelebihan dan Kekurangan: Tantangan Implementasi Sishankamrata Kontemporer

Sishankamrata memiliki keunggulan fundamental berupa efek daya tangkal total (*Total Deterrence Effect*) yang lahir dari ancaman bahwa musuh harus menghadapi perlawanan masif dari seluruh rakyat. Keunggulan ini menghasilkan efisiensi biaya pertahanan di masa damai, karena sumber daya tempur cadangan ditanggung oleh potensi sipil, mengurangi kebutuhan anggaran rutin untuk personel aktif.

Namun, sistem ini terganjal oleh kekurangan struktural dan operasional yang signifikan di era modern:

1. Disparitas Kapabilitas Antar-Matra: Fokus masif pada darat menciptakan ketimpangan postur pertahanan. TNI AL dan TNI AU, sebagai garis pertahanan terdepan di laut dan udara yang merupakan akses vital negara kepulauan, seringkali memiliki keterbatasan Alutsista dan kesiapan operasional dibandingkan dengan luasnya wilayah maritim yang harus diawasi. Postur pertahanan menjadi tidak seimbang, menempatkan risiko besar pada domain maritim.
2. Hambatan Integrasi dan Ego Sektoral Komponen Pendukung: Kekurangan paling kritikal adalah rendahnya efektivitas koordinasi vertikal dan horizontal dalam mengintegrasikan Komponen Pendukung. Dalam penanganan ancaman non-militer yang bersifat lintas sektoral (seperti IUU Fishing, penanggulangan terorisme, atau bencana), instansi sipil (Bakamla, Polairud, KKP, Bea Cukai) seringkali beroperasi berdasarkan *ego sektoral* dan kerangka hukum masing-masing. Hal ini menyebabkan fragmentasi *Common Operational Picture* (COP) dan duplikasi upaya, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas respons semesta (Sudirman, 2024).
3. Kelemahan dalam Menghadapi Ancaman Domain Baru (Kasus Siber): Ancaman siber merupakan domain baru yang menuntut respons Sishankamrata secara total, melibatkan Komponen Pendukung dari seluruh instansi negara. Namun, kasus berulang mengenai kerentanan data nasional dan serangan siber (yang meningkat antara 2020-2025) menunjukkan bahwa integrasi pertahanan siber masih terfragmentasi. Standar keamanan dan *information sharing* antara BSSN, TNI, dan kementerian/lembaga sipil seringkali tidak sinkron. Kegagalan mencapai respons siber yang terpadu membuktikan bahwa Sishankamrata, meskipun kuat secara doktrinal, belum sepenuhnya matang untuk menghadapi perang hibrida yang beroperasi di domain non-fisik.

Secara keseluruhan, Sishankamrata masih berfungsi sebagai payung filosofis yang kuat. Namun, implementasinya yang bias terhadap pertahanan darat dan masalah kronis dalam mengintegrasikan Komponen Pendukung menunjukkan perlunya reformasi strategis untuk mencapai postur yang lebih seimbang dan mampu merespons secara efektif

ancaman di domain maritim, udara, dan siber yang semakin mendominasi kepentingan nasional di abad ke-21.

Pertahanan Maritim Indonesia dalam Konstelasi Geopolitik Natuna dan Laut Natuna Utara

Konstelasi geopolitik Laut Natuna Utara (LNU) menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan, terutama karena Natuna Utara berada pada irisan klaim *nine-dash line* Tiongkok. Walaupun Indonesia secara tegas bukan *claimant state*, dinamika aktivitas Tiongkok mulai dari penetrasi kapal Coast Guard, kehadiran kapal survei geologi, hingga mobilisasi *maritime militia* menjadikan kawasan Natuna sebagai ruang kontestasi kekuatan regional. Fajri (2020) menunjukkan bahwa situasi ini bertransformasi menjadi *hybrid warfare*, bentuk perang multidimensi yang mengkombinasikan operasi sipil, ekonomi, militer, dan informasi untuk menekan pihak lawan tanpa eskalasi terbuka. Temuan ini sejalan dengan analisis Ali, dkk (2022) mengenai *grey-zones operations* sebagai strategi negara besar dalam sengketa maritim Asia. Dalam konteks Indonesia, ancaman tersebut semakin kompleks karena mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan legitimasi hukum internasional, sebagaimana digarisbawahi oleh Ali, dkk (2022) yang mengidentifikasi peningkatan aktivitas ilegal lintas negara di ZEE Indonesia akibat lemahnya kehadiran negara di laut.

Dinamika geopolitik tersebut memperteguh bahwa pertahanan Indonesia tidak dapat lagi bertumpu pada paradigma darat. Indrawan (2015) menegaskan bahwa paradigma pertahanan teritorial berbasis darat yang berakar pada Sishankamrata era perang kemerdekaan tidak sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi ancaman dominan dari laut. Pemikiran ini selaras dengan Alfred Thayer Mahan (1890), yang berpendapat bahwa kejayaan negara kepulauan sangat ditentukan oleh kekuatan maritim dan kemampuan mengontrol jalur komunikasi laut. Hal senada ditegaskan kembali oleh Geoffrey Till (2018), yang menyatakan bahwa *sea power* modern tidak hanya mencakup kekuatan tempur, tetapi juga kemampuan diplomatik, ekonomi, dan penguasaan domain informasi. Ketergantungan Indonesia pada jalur perdagangan laut global serta potensi migas Natuna memperkuat kebutuhan akan orientasi *maritime-based defense*, bukan lagi *continental-based defense*.

Ketika ancaman semakin beririsan antara militer dan non-militer, implementasi pertahanan maritim Indonesia mengalami transformasi signifikan. Penguatan kehadiran militer di Natuna melalui pembentukan Kogabwilhan I, pembangunan pangkalan terpadu, dan intensifikasi patroli TNI AL menunjukkan pergeseran strategi menuju pertahanan aktif. Ali, dkk (2022) menekankan pentingnya kemampuan deteksi dini yang terintegrasi melalui *Maritime Information Center* guna memberikan peringatan cepat terhadap aktivitas ilegal atau intrusi negara asing. Selain itu, Indonesia mulai memperkuat operasi gabungan laut-udara untuk melindungi ZEE dan mendukung operasi *sea denial*, suatu konsep yang menurut Till (2018) lebih realistis bagi negara berkembang ketimbang *sea control* yang memerlukan kekuatan laut superior. Di saat yang sama, menurut Anwar (2016), implementasi keamanan maritim harus diartikan sebagai serangkaian upaya lintas sektor

yang melibatkan pembangunan kekuatan industri maritim, kapasitas diplomasi maritim, dan kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan demikian, implementasi kebijakan pertahanan maritim Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai fungsi militer, melainkan menjadi fondasi bagi ketahanan nasional.

Transformasi implementasi tersebut berkelindan dengan arsitektur kelembagaan pertahanan maritim yang masih menghadapi problem koordinasi. Kehadiran banyak institusi TNI AL, Bakamla, KKP, Kemenhub, Ditjen Bea Cukai menyebabkan *overlapping* kewenangan yang menghambat respon cepat terhadap ancaman maritim. Anwar (2016) menyoroti bahwa perbedaan definisi dan lingkup keamanan maritim di antara lembaga-lembaga ini menyebabkan tidak adanya visi tunggal dalam penanganan ancaman laut. Dalam konteks perang hibrida, kelemahan struktur kelembagaan menjadi celah strategis. Hughes & Girrier (2018) menyatakan bahwa struktur komando yang fragmentaris merupakan kerentanan utama dalam *maritime domain awareness*. Sejalan dengan Fajri (2020) yang menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan arsitektur pertahanan maritim berbasis MPESI (Militer-Politik-Ekonomi-Sipil-Informasi) untuk merespons ancaman multidimensi secara komprehensif.

Kelemahan arsitektur kelembagaan tersebut semakin memperkuat urgensi penguatan pertahanan maritim Indonesia, baik dari aspek kekuatan, kebijakan, maupun diplomasi. Natuna Utara, sebagai *frontier* antara kepentingan nasional Indonesia dan ekspansi Tiongkok, menuntut postur pertahanan yang mampu menghasilkan efek deteren yang kredibel. Indrawan (2015) menegaskan bahwa negara kepulauan membutuhkan kombinasi kekuatan laut-udara untuk merespons ancaman yang memerlukan mobilitas cepat dan cakupan luas. Selain itu, ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pencurian ikan yang marak di ZEE Indonesia, sebagaimana dicatat Ali, dkk (2022), memperlihatkan urgensi untuk memperkuat keamanan maritim sebagai bagian dari kelangsungan ekonomi nasional..

Dengan demikian, urgensi penguatan pertahanan maritim Indonesia bukan semata respons terhadap ancaman eksternal, tetapi bagian dari strategi nasional jangka panjang. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di persilangan perdagangan dunia, Indonesia harus memastikan kontrol efektif atas wilayah lautnya, mengembangkan industri pertahanan maritim, menata ulang arsitektur kelembagaannya, serta memperkuat diplomasi maritim baik dalam kerangka ASEAN maupun mekanisme internasional lainnya. Pertahanan maritim Indonesia tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek sektoral, tetapi sebagai pilar keberlanjutan negara-bangsa yang bertumpu pada laut sebagai ruang hidup strategis dan identitas nasional.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa memperkuat pertahanan nasional Indonesia sangat penting. Keterlibatan warga negara memiliki potensi besar untuk mendukung pertahanan darat, seperti yang ditunjukkan oleh pelaksanaan Sistem Pertahanan Semesta melalui pelatihan Komponen Cadangan. Namun, diperlukan perhatian yang lebih serius pada pendanaan, kualitas materi, teknik pelatihan, dan ketersediaan fasilitas pendukung agar

peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Komponen Cadangan mungkin tidak memberikan kontribusi yang optimal untuk sistem pertahanan nasional jika tidak ada perbaikan pada elemen-elemen tersebut. Sebaliknya, situasi keamanan di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa pertahanan maritim Indonesia semakin menantang. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan pertahanan laut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan meningkatkan kehadiran dan patroli. Ini juga perlu melibatkan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan peningkatan koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab atas wilayah maritim. Menjaga kedaulatan negara sangat penting, terutama di wilayah perbatasan laut yang strategis. Berdasarkan hal ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari bagaimana kerja sama antar lembaga dalam sistem pertahanan maritim Indonesia berfungsi. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait atau studi kasus di daerah lain, untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik tentang pelaksanaan Komponen Cadangan dan pertahanan maritim secara keseluruhan.

Referensi

- Ali, I. M., Yudho, L. P., & Sianturi, D. (2022). Strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di wilayah laut Indonesia. *Jurnal Education and Development*.
- Antara News. (2024). Maintaining state sovereignty in North Natuna Sea. <https://en.antaranews.com/news/333101/maintaining-state-sovereignty-in-north-natuna-sea>
- Anwar, S. (2016). Membangun keamanan maritim Indonesia dalam analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. *Jurnal Pertahanan*.
- Asmara, R. (2025). Sumber daya strategi pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di selat-selat strategis guna mendukung sistem pertahanan semesta. *Jurnal Maritim Indonesia*. Retrieved from <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/40>
- Bakamla RI. (2024). Siaran pers: Deteksi dan pengusiran kapal asing di Laut Natuna Utara. <https://tni.mil.id/view-247688-bakamla-ri-deteksi-dan-usir-kapal-china-coast-guard-di-laut-natuna-utara.html>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://www.researchgate.net/publication/240807798_Document_Analysis_as_a_Qualitative_Research_Method
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.).

https://www.academia.edu/44956852/RESEARCH_DESIGN_Qualitative_Quantitative_and_Mixed_Methods_Approaches

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). https://www.researchgate.net/publication/359898621_The_SAGE_Handbook_of_Qualitative_Research_Design

Fajri, M. B. (2020). Strategi pertahanan maritim Indonesia di tengah dinamika perang hibrida kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*.

Gultom, M. F., Rizqullah, F. H., Iqbal, M., Cahyadi, H. R., & Syahrin, M. (2025). Analisis yuridis terhadap strategi geopolitik di Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3672>

Hikam, M. A. S., & Praditya, Y. (2025). Globalisasi dan pemetaan kekuatan strategis pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman transnasional: Berdasarkan analisis model Element of National Power (PMESII). *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/357>

Hughes, W. P., & Girrier, R. P. (2018). *Fleet tactics and naval operations*. Naval Institute Press.

Indrawan, J. (2015). Perubahan paradigma pertahanan Indonesia dari pertahanan teritorial menjadi pertahanan maritim: Sebuah usulan. *Jurnal Pertahanan*.

Indrawan, J. (2018). Sistem pertahanan semesta Indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(1), 1–18. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/194>

Kemenko Polkam RI. (2025). Kemenko Polkam tekankan sinergi nasional dalam penguatan keamanan laut. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-tekankan-sinergi-nasional-dalam-penguatan-keamanan-laut/>

Kemenko Polkam RI. (2025, 19 Agustus). Komcad dan Komduk adalah pilar utama sistem pertahanan semesta. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-komcad-dan-komduk-adalah-pilar-utama-sistem-pertahanan-semesta>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). Nelayan terancam laut terluka: Dampak IUU fishing bagi masyarakat dan ekosistem. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny>

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kemenhan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan. <https://www.kemhan.go.id/poathan/wp-content/uploads/2024/02/Permenhan-No.-3-Tahun-2021-ttg-Pembentukan-Penetapan-dan-Pembinaan-Komcad.pdf>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Latihan Penyegaran Komponen Cadangan. <https://www.kemhan.go.id/poathan/wp-content/uploads/2024/02/Permenhan-No.-16-Tahun-2021-ttg-Latgar-Komcad.pdf>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20Content%20Analysis_%20A%20Introduction%20to%20Its%20Methodology.pdf
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). Penanganan keamanan maritim perbatasan wilayah laut dan ancaman maritim. *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/395/265>
- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Internet Archive.
- Marliani, M. (2025). Enhancing maritime security: Challenges and strategies in Indonesia's Natuna Sea. *Journal of Maritime Policy Science*. <https://doi.org/10.31629/jmps.v1i1.6876>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Reuters. (2024). Indonesia says Chinese vessel twice driven away after disrupting energy survey. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-chinese-vessel-twice-driven-away-after-disrupting-energy-survey-2024-10-24/>
- Siregar, H. R., & Prabowo, D. J. (2023). Integrasi Komponen Cadangan dalam Peningkatan Kesiapan Sishankamrata Pasca UU PSDN. *Jurnal Pertahanan dan Geopolitik*, 12(1), 45-60.
- Sudirman, F. (2024). Tantangan Ego Sektoral Lembaga Non-Militer dalam Implementasi Sishankamrata Maritim. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(2), 101-118.
- Susanto, S. H., Supriyadi, A. A., & Harefa, F. (2025). National defense policy based on readiness against non-military threat. *LEBAH*, 18(4).

Suseto, B., Othman, Z., & Razalli, F. B. M. (2025). An overview of Indonesia's maritime strategy. *Indonesian Journal of Geography*.

Till, G. (2018). *Seapower: A guide for the twenty-first century*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1).

Yudha, A. D., & Wirayuda, A. (2021). Integrasi Komponen Cadangan dalam Rangka Peningkatan Kesiapan Sishankamrata. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 251-268.